

PRIORITAS PEMILIHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN DI KABUPATEN REMBANG

Location Selection Priority of Fishing Port Development at Rembang Regency

Oleh:

Iin Solihin^{1*} dan Muhammad Syamsu Rokhman²

Diterima: 18 Februari 2009; Disetujui: 1 September 2009

ABSTRACT

The background of this research is needed location selection priority to the fishing port development in one region. Defining this priority is important because 1) there is restricted allocation fund to the fishing port development and 2) the fishing port has been existence that can be influenced to other fishing port development. This objective research is defining the fishing port development priority at Rembang Regency and using Analytical Hierarchy Process Method to achieve this objective. Research result indicates that Tasik Agung coastal fishing port is main priority to develop, and the further priorities are Sarang Medur fish landing place, Karang Anyar fish landing place, Tanjungsari fish landing place and Pandangan fish landing place. The program to develop Tasik Agung coastal fishing port are investment development, and fisheries business.

Key words: development, fishing port, priority

ABSTRAK

Penelitian ini didasari pemikiran tentang perlunya pemilihan prioritas pengembangan pelabuhan perikanan di suatu wilayah yang mempunyai banyak pelabuhan perikanan. Penentuan prioritas ini penting mengingat 1) adanya keterbatasan alokasi anggaran pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan dan 2) adanya pelabuhan perikanan yang dapat memberikan pengaruh ganda (*multiplier effect*) terhadap pelabuhan perikanan di sekitarnya. Pengembangan pelabuhan prioritas ini akan mendorong pelabuhan perikanan yang lain untuk berkembang pula. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menentukan prioritas pengembangan PP/PPI di Kabupaten Rembang. Metode analisis yang digunakan adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PP/PPI) yang dipilih untuk dikembangkan adalah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasik Agung. Prioritas selanjutnya adalah PPI Sarang Meduro, PPI Karanganyar, PPI Tanjungsari, dan PPI Pandangan. Program pengembangan difokuskan pada PPP Tasik Agung dan PPI Sarang Meduro yang memiliki potensi yang besar dibanding PPI lainnya. Prioritas program utama yang perlu dilakukan di PPP Tasik Agung yaitu program pengembangan investasi dan usaha perikanan. Sementara di PPI Sarang Meduro program pengembangan diprioritaskan untuk peningkatan fasilitas PPI.

Kata kunci: pengembangan, pelabuhan perikanan, prioritas

¹ Dept. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK, IPB

² Departemen Kelautan dan Perikanan

* Korespondensi : insol_ipb@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Pelabuhan perikanan di Kabupaten Rembang berjumlah 13 unit yang tersebar di 5 kecamatan pantai dari 6 kecamatan pantai yang ada. Keberadaan pelabuhan perikanan yang tersebar merata di pesisir utara Kabupaten Rembang memberikan arti penting dalam meningkatkan pertumbuhan aktivitas perikanan di wilayah tersebut. Seiring dengan kebijakan daerah Kabupaten Rembang yaitu melakukan pembangunan kawasan utamanya yaitu kawasan pesisir maka peran pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan aktivitas di wilayah pesisir sangat diharapkan.

Melihat aspek pelabuhan perikanan yang begitu penting maka perlu dilakukan upaya pengelolaan dan pengembangan secara efektif dan efisien. Perencanaan dalam pengembangan pelabuhan perikanan harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah dan ketersediaan sumberdaya yang ada. Keterkaitan wilayah antar Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PP/PPI) maupun antara PP/PPI dengan rencana pembangunan wilayah, potensi di masing-masing PP/PPI, besarnya pembiayaan, serta dukungan masyarakat merupakan pertimbangan perlunya dibuat suatu prioritas untuk rencana pengembangan pelabuhan-pelabuhan tersebut.

Prioritas dibuat dengan memilih lokasi PP/PPI yang berpotensi sebagai penggerak dan penarik pertumbuhan PP/PPI lainnya. PP/PPI yang diprioritaskan nantinya diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi perikanan dan mendorong pertumbuhan daerah-daerah di sekitarnya. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui operasional di masing-masing PP/PPI serta menentukan prioritas pengembangan nantinya..

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menentukan prioritas lokasi pengembangan PP/PPI di Kabupaten Rembang.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei. Survei dilakukan melalui pengamatan dan wawancara/kuesioner. Pengamatan mencakup operasional 13 PP/PPI di Kabupaten Rembang yang meliputi aktivitas tambat labuh/pendaratan ikan, pelelangan hasil tangkapan, pelayanan/usaha perbekalan laut dan pemasaran/pendistribusian hasil tangkapan.

Kegiatan wawancara dilakukan secara *purposive sampling*. Responden dipilih secara khusus berdasarkan pemahaman terhadap per-

masalahan penelitian. Jumlah responden dianggap sudah mencukupi dan sesuai kebutuhan untuk mendapatkan informasi secara akurat. Pihak yang diwawancara adalah 1) Penge- lola PP/PPI untuk mendapatkan informasi mengenai sistem pengelolaan PP/PPI selama ini, hambatan dan permasalahan, kriteria pengem- bangan PP/PPI dan prioritasnya, 2) Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perikanan tangkap di Kabupaten Rembang selama lima tahun, hambatan dan permasalahan berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan PP/ PPI, kebijakan pemerintah daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pengem- bangan perikanan serta kriteria pengembangan PP/PPI dan prioritasnya, 3) Bappeda untuk mendapatkan informasi mengenai program yang dijalankan dan akan dijalankan sehubu- ngan dengan masalah pelabuhan perikanan, hambatan dan permasalahan berkaitan dengan pengembangan PP/PPI, kriteria pengembangan untuk PP/PPI dan prioritasnya, 4) Nelayan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat pelayanan di PP/PPI, hambatan dan permasa- lahan berkaitan dengan aktivitasnya di PP/PPI, status dan tingkat pendidikan nelayan, daerah penangkapan, teknologi penangkapan yang digunakan 5) Masyarakat sekitar PP/PPI untuk mendapatkan informasi hambatan dan perma- sahan berkaitan dengan aktivitas di PP/PPI, 6) Pihak pengusaha perikanan untuk mendapatkan informasi asal pasokan bahan baku untuk industri, daerah pemasaran hasil industri, ham- batan dan permasalahan berkaitan dengan pe- ngembangan PP/PPI, kriteria pengembangan dan prioritasnya dan 7) pihak Dinas Pariwisata untuk mendapatkan informasi keterkaitan sektor pariwisata terhadap sektor perikanan dalam pembangunan daerah, hambatan dan perma- salahan berkaitan dengan pengembangan PP/ PPI.

Penilaian prioritas pengembangan dilaku- kan dengan menggunakan Metode Proses Hie- rarki Analitik (PHA) yang merujuk pada Saaty (1991) dan Nurani (2002). Penilaian pada hie- rarki ini didasarkan urutan prioritas dalam rang- ka memilih lokasi PP/PPI untuk pengem- bangan. Struktur hierarki ini terdiri dari 5 level yaitu level 1 adalah fokus/ tujuan utama yaitu memilih lokasi PP untuk pengembangan. Level 2 adalah pihak terkait yang berperan penting dalam pengambilan keputusan untuk menentu- kan pengembangan perikanan di suatu wilayah termasuk pengembangan PP/PPI. Level 3 ada- lah kriteria yang dipakai untuk menilai masing- masing PP/PPI sebagai faktor yang dikembang- kan. Level ini terdiri dari aspek produksi, aspek daerah penangkapan ikan, aspek pemasaran, aspek sarana & prasarana, aspek lokasi, aspek

armada kapal dan aspek nilai produksi. Level 4 adalah sub kriteria pengembangan yang merupakan penjabaran dari kriteria pengembangan, yaitu penjabaran dari sarana dan prasarana PP berupa fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang. Penjabaran dari aspek lokasi yaitu ketersedian lahan kosong dan aksesibilitas lokasi. Penjabaran dari kriteria pemasaran yaitu pemasaran lokal kabupaten, provinsi, dan antar provinsi. Penjabaran dari aspek armada kapal yaitu jumlah armada, jenis armada, dan teknologi penangkapan. Kriteria pengembangan yaitu penjabaran dari kriteria yang ada yang lebih spesifik. Level 5 adalah kebijakan terpilih yaitu lokasi PP/PPI terpilih yang jumlahnya ada 13 PP/PPI yaitu PPI Tunggulsari, PPI Pacar, PPI Gegungungwetan, PPI Tanjungsari, PPP Tasik Agung, PPI Kabongan, PPI Pasarbangi, PPI Pangkalan, PPI Pandangan, PPI Karanglincak, PPI Bakung, PPI Karanganyar, dan PPI Sarang Meduro.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Hasil analisis hierarki menunjukkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pihak terkait yang berkepentingan didalam pengambilan keputusan penentuan lokasi PP untuk pengembangan dengan bobot (0,280). Prioritas berikutnya adalah Bappeda (0,220), Pengelola PP (0,190), Pengusaha perikanan (0,100), Nelayan (0,090), Dinas Pariwisata (0,070) dan Masyarakat sekitar PP/PPI (0,050).

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki bobot terbesar karena instansi tersebut lebih mengetahui karakteristik dan permasalahan mengenai sektor perikanan. Perencanaan pembangunan nantinya harus melakukan koordinasi dengan pihak Bappeda sebagai instansi yang berperan dalam perencanaan pembangunan daerah. Arah pembangunan dan pengembangan PP/PPI disesuaikan dengan arah pengembangan wilayah daerah.

Hasil analisis hierarki berdasarkan pendapat pihak terkait menunjukkan pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) memiliki bobot terbesar (0,320), prioritas berikutnya adalah armada kapal sebesar (0,201), lokasi (0,130), pemasaran (0,103), daerah penangkapan ikan (0,089), nilai produksi (0,079), dan produksi (0,075). Pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) memiliki bobot terbesar karena keberhasilan aktivitas/operasional di pelabuhan perikanan sangat didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

Pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada pembangunan fasilitas pokok

(seperti dermaga, *break water*, talud, dan lainnya) dengan bobot (0,172). Selanjutnya fasilitas fungsional (seperti ruang pelelangan, pengepakan, kantor administrasi, dan lainnya) dengan bobot (0,095) dan fasilitas penunjang (balai pertemuan nelayan, MCK, musholla, dan lainnya) dengan bobot (0,052). Pembangunan sarana pokok sangat penting demi keamanan dan kenyamanan para pengguna utamanya nelayan saat melakukan aktivitas pandaratan atau mengisi perbekalan di masing-masing PP/PPI. Fasilitas pokok sebagian besar PP/PPI di Kabupaten Rembang belum tersedia. Secara umum hanya tersedia jalan kompleks dan lahan tanah. Kondisi jalan banyak yang rusak dan sempit serta lahan tanah yang terbatas. PP/PPI tetentu saja seperti PPP Tasikagung dan PPI Sarang Meduro yang kondisi jalannya masih baik, sedangkan yang lainnya masih dalam kondisi rusak dan sempit.

Fasilitas fungsional di masing-masing PP/PPI seperti gedung pelelangan atau kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sudah ada, hanya saja kondisinya kurang baik. Banyak gedung pelelangan yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya seperti yang ada di PPI Gegungung Wetan, PPI Pacar, PPI Pangkalan, PPI Pasarbangi, PPI Karanglincak, dan PPI Bakung. TPI tersebut hanya digunakan untuk aktivitas penimbangan dan penyimpanan alat tangkap oleh nelayan. Kondisi gedung pelelangan PPI yang ada mengharuskan adanya perbaikan dan perluasan.

Pengembangan lokasi dibagi dalam 2 subkriteria yaitu aspek pengembangan lahan kosong, dan aspek aksesibilitas lokasi PP/PPI. Aspek ketersediaan lahan menunjukkan kemungkinan suatu lokasi untuk dikembangkan melalui perluasan ukuran fasilitas dengan melihat lahan yang ada. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi adanya pembebasan lahan pemukiman nelayan atau reklamasi pantai yang menghabiskan banyak biaya. Aksesibilitas lokasi menunjukkan tingkat kemudahan lokasi untuk dijangkau oleh pengguna. Hasil analisis hierarki menunjukkan aksesibilitas memiliki bobot terbesar (0,104) sedangkan ketersediaan lahan kosong hanya 0,026. Hal ini sangat dipahami mengingat adanya akses yang lancar ke lokasi akan memudahkan aktivitas pendistribusian hasil tangkapan ke luar pelabuhan dan memudahkan para pengguna untuk memanfaatkan PP/PPI. Seluruh PP/PPI di Kabupaten Rembang sebagian besar kondisi aksesibilitas ke pelabuhan kurang baik karena jalan yang sempit dan rusak. Kendaraan roda 4 relatif sulit menjangkau sampai gedung TPI. Hanya kendaraan roda 2, sepeda dan becak yang masih bisa masuk sampai TPI. Kondisi seperti itu

sangat disayangkan mengingat semua lokasi PP berada pada jalur lalu lintas yang strategis yaitu jalur pantura sebagai jalur utama perdagangan di Pulau Jawa. Prioritas pengembangan lokasi diarahkan untuk perbaikan aksesibilitas lokasi pelabuhan. Disamping itu, pertimbangan pengembangan PP/PPI adalah ketersediaan lahan kosong. Kenyataannya, lahan kosong di sekitar PP/PPI sangat terbatas. PP/PPI yang masih memiliki lahan kosong dan masih memungkinkan dilakukan perluasan ke arah darat adalah PPP Tasik Agung dan PPI Sarang Meduro, sedangkan untuk pelabuhan yang lain sudah tidak memungkinkan lagi karena relatif padatnya pemukiman nelayan. Upaya yang bisa dilakukan adalah perluasan lahan ke arah laut. Tentunya cara tersebut menghabiskan biaya besar dan pihak PP/PPI tidak memiliki cukup dana untuk pengembangan ke arah laut.

Pengembangan armada kapal lebih dititikberatkan pada aspek pengembangan teknologi penangkapan dengan bobot (0,083), selanjutnya pengembangan ukuran armada (0,066), dan jumlah armada (0,052). Sebagian besar masyarakat nelayan Kabupaten Rembang perlu mengubah cara dan metode penangkapan yang tradisional ke arah teknologi yang lebih efektif dengan tujuan meningkatkan produktivitas hasil tangkapan. Secara umum dalam menentukan daerah penangkapan, sebagian besar nelayan Rembang melakukan perkiraan secara tradisional seperti mengukur keberadaan ikan dengan melihat kedalamannya dan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Tahun 2002 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang pernah mengujicobakan alat sonar di PPI Tasik Agung untuk mendeteksi keberadaan ikan berdasarkan rambatan gelombang suara, tetapi tidak berhasil. Faktor kekurangmampuan nelayan dalam menyerap teknologi serta terbatasnya modal untuk membeli peralatan sebagai penyebab kegagalan usaha tersebut. Pengembangan teknologi penangkapan perlu bantuan baik dari pemerintah maupun swasta. Pengembangan armada kapal selanjutnya diarahkan pada pengembangan ukuran kapal, karena dengan ukuran kapal yang besar misalnya berukuran 25 GT ke atas dapat mencapai daerah penangkapan yang lebih jauh, mengingat daerah perairan kabupaten sudah padat tangkap oleh nelayan berukuran kurang dari 5 GT.

Aspek pemasaran diarahkan pada pemasaran antar provinsi dengan bobot (0,065), selanjutnya pemasaran provinsi (0,027), dan pemasaran lokal kabupaten (0,011). Pemasaran antar provinsi sebagian besar disalurkan ke daerah Jawa Timur, Jawa Barat bahkan luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan. Jaminan harga yang tinggi di luar daerah khususnya

luar provinsi membuat pihak pengelola lebih memilih untuk memasok ke luar daerah. Pemasaran dalam lingkup kabupaten semata-mata hanya untuk memenuhi permintaan lokal.

Analisa menyeluruh terhadap berbagai aspek menempatkan PPP Tasik Agung menjadi prioritas yang pertama untuk pengembangan dengan bobot (0,207). PPP Tasik Agung ini memiliki potensi yang besar baik jumlah armada, ukuran armada, produksi dan nilai produksi yang dihasilkan, sarana dan prasarana yang tersedia, pemasaran dan lokasi yang menguntungkan. Prioritas selanjutnya adalah PPI Sarang Meduro (0,150), PPI Karanganyar (0,106), PPI Tanjungsari (0,083), PPI Pandangan (0,069), PPI Tunggulsari (0,063), PPI Pangkalan (0,052), PPI Pasarbanggi (0,049), PPI Gegunung Wetan (0,043), PPI Kabongan (0,043), PPI Pacar (0,043), PPI Karanglincak (0,043), dan PPI Bakung (0,043).

3.2 Pembahasan

Pengembangan suatu pelabuhan perikanan membutuhkan sumberdaya yang tidak sedikit, terutama dana, apalagi jumlah pelabuhan perikanan cukup banyak seperti di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Pelabuhan perikanan yang terdapat di wilayah ini berjumlah 13 PP, 1 unit berstatus PPP dan 12 unit lainnya berstatus PPI. Adanya keterkaitan wilayah, potensi, dukungan masyarakat serta sumber dana yang tersedia mendorong untuk dibuat suatu prioritas pengembangan.

Banyak pihak terkait yang berkepentingan dalam pemanfaatan PP/PPI sehingga penentuan prioritas pengembangan pun tidak terlepas dari peran pihak-pihak tersebut. Pihak terkait yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Dinas Pariwisata, Pengusaha Perikanan, Nelayan, Pengelola PP/PPI, dan Masyarakat sekitar PP/PPI. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan PP/PPI. Hal ini dikarenakan instansi ini lebih berwenang dalam mengatur aktivitas perikanan serta dalam pengambilan kebijakan tentang perikanan. Perencanaan pengembangan harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya utamanya adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) karena instansi ini lebih berperan dalam perencanaan pengembangan wilayah yang mana dalam pengembangan pelabuhan harus disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah apakah sejalan atau bahkan bertentangan.

Prioritas pengembangan PP/PPI dilihat berdasarkan kriteria-kriteria yaitu aspek produk-

si, nilai produksi, distribusi/pemasaran hasil tangkapan, daerah penangkapan, armada kapal, aspek lokasi dan aspek sarana dan prasarana. Masing-masing kriteria mempunyai bobot dan kepentingan yang berbeda. Berdasarkan pendapat pihat-pihak terkait diatas kriteria sarana dan prasarana memiliki bobot terbesar dalam pengembangannya. Sarana dan prasarana yang tersedia dengan baik akan memperlancar aktivitas yang ada sehingga tercipta keteraturan dan kemudahan dalam pengelolaannya.

Berdasarkan potensi yang ada di masing-masing PP/PPI yang meliputi kriteria-kriteria diatas, menunjukkan bahwa PPP Tasik Agung sebagai PP prioritas pengembangan yang pertama. Prioritas yang kedua adalah PPI Sarang Meduro. Kedua PP/PPI ini memiliki potensi pengembangan yang cukup tinggi dibandingkan dengan PPI lainnya.

Pengembangan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang ada tidak terlepas dari pengembangan kawasan pantai utara Rembang secara keseluruhan. Pengembangan kawasan dalam konteks ini bisa dipahami sebagai suatu proses pengembangan fungsi-fungsi yang ada dalam wilayah tersebut termasuk juga fungsi-fungsi ekonomi (Rustiadi, 2007). Pelabuhan perikanan sebagai pusat aktifitas perikanan tangkap merupakan elemen penting dalam pengembangan wilayah pantai utara Rembang. Proses pengembangan tersebut terkait interaksi antar pelabuhan perikanan yang berupa mobilitas barang yaitu produk hasil tangkapan, orang (nelayan, pedagang dan pelaku lainnya) maupun modal. Pelabuhan-pelabuhan perikanan tersebut dalam prosesnya, ada yang mengalami perkembangan yang relatif cepat dibandingkan dengan pelabuhan lainnya. Hal ini berakibat pada terbentuknya pola hubungan antar pela-

buhan perikanan tersebut dimana ada pelabuhan perikanan yang berperan sebagai inti dan pelabuhan lainnya sebagai plasma. Perkembangan pelabuhan inti diharapkan dapat memberikan dampak bagi perkembangan pelabuhan perikanan disekitarnya. Pada gilirannya hubungan-hubungan tersebut akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan wilayah secara keseluruhan.

Penetapan PPP Tasik Agung dan PPI Sarang Meduro, dalam konteks perkembangan wilayah pantura Rembang sangat strategis mengingat PPP Tasik Agung berada di Pantura Rembang bagian barat, sedangkan PPI Sarang Meduro berada di bagian timur. Kedua pelabuhan ini diharapkan dapat berperan sebagai pelabuhan inti yang akan mendorong pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya. Hal tersebut untuk menghindari adanya kesenjangan tingkat aktivitas yang terlalu tinggi.

4. KESIMPULAN

PPP Tasik Agung dan PPI Sarang Meduro merupakan dua pelabuhan perikanan yang menjadi prioritas lokasi pengembangan pelabuhan di Kabupaten Rembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurani TW. 2002. *Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process)*: Bahan kuliah. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Rustiadi, dkk. 2007. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Saaty TL. 1991. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Jakarta: PT Pustaka Binaan Pressindo.

Lampiran 1 Diagram PHA prioritas pemilihan lokasi PP/PPI

